



# **LAPORAN KINERJA INFORMASI PENANGGULANGAN BENCANA**



**SEMESTER I**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN TABANAN  
JL. GATOT SUBROTO NO.2 KEDIRI  
TLP.(0361) 811171  
2023**

## KATA PENGANTAR

Atas asung kerta waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) kami bersyukur dapat menyusun Laporan Kinerja Informasi Penanggulangan Bencana Semester I Tahun 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Penyusunan laporan ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam kerangka *good governance* seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres tersebut mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang diambil. Laporan tahunan ini memberikan gambaran kinerja BPBD dalam pembangunan daerah.

Rampungnya laporan ini tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras aparatur BPBD. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan data dan informasi sehingga laporan ini selesai tepat pada waktunya.

Dengan berbagai keterbatasan yang ada, dimohon masukan dan sarannya agar lebih meningkatnya kinerja Badan Penanggulangan Bencana secara berkelanjutan untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam rencana startegis tahun 2021-2026

Tabanan, 13 Juli 2023

Kepala Pelaksana BPBD  
Kabupaten Tabanan,  
  
Nyoman Srinadha Giri, SE  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19740624 200604 1 010

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum .....	2
1.3 Tujuan.....	3
BAB II Gambaran Umum BPBD .....	3
2.1 Kondisi Administratif.....	3
2.2 Kondisi Geografis Wilayah.....	3
2.3 Pemetaan Risiko Bencana.....	3
2.4 Dukungan Sumber Daya Aparatur.....	5
BAB III RENCANA KERJA .....	6
3.1 Pengukuran SPM.....	6
3.2 Pengukuran IKT .....	6
3.3 Pengukuran IKU .....	6
3.4 Pengukuran IKP.....	7
3.5 Pengukuran IKK.....	7
BAB IV KINERJA PEMBANGUNAN .....	9
4.1 Capaian Kinerja.....	9
4.2 Capaian Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana .....	12
4.3 Capaian Tanggap Bencana dan Penyaluran Logistik .....	13
4.4 Capaian Rekonsiliasi dan Rehabilitasi.....	14
4.5 Pengelolaan Aset .....	15
4.6 Pengelolaan Keuangan .....	15
BAB V PENUTUP .....	16
4.1 Kesimpulan.....	16
4.2 Saran.....	16

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang.**

Pemerintah Indonesia sangat berkomitmen dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Indonesia Tangguh Bencana (*Resilien*) untuk Pembangunan Berkelanjutan 2045. Perencanaan pembangunan telah diarahkan untuk adanya sinergisitas prioritas pembangunan pusat dan daerah. Perencanaan dalam penanggulangan bencana disusun dan ditetapkan agar seluruh kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terkordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh dengan baik.

Pemerintah pusat telah menetapkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2040, dimana dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) melalui tiga strategi yaitu : 1). Rencana aksi dalam bentuk mitigasi bencana, 2).Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dalam bentuk rencana kontigensi, dan 3). Rencana pemulihan prabencana dalam bentuk rencana rekuntruksi dan rehabilitasi pasca bencana.

Prioritas pembangunan Provinsi Bali telah sinergis dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tabanan, sehingga dalam kebencanaan sesuai prioritas ketiga yakni jaminan sosial dan ketenagakerjaan maka pemerintah daerah terus berinovatif dalam mewujudkan daerah aman dan nyaman sehingga perekonomian dan inventasi dapat berkembang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan telah menetapkan strategi dalam manajemen bencana dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang dihadapi sehingga dapat melakukan inovasi program dan kegiatan prioritas. Adapun isu strategis yang dihadapi dan prioritas ditangani di tahun 2022 yaitu : 1). Pelayanan informasi (edukasi) rawan bencana kepada multi pihak, 2). Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana untuk investasi pembangunan, 3). Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana untuk pulih lebih cepat (*risilien*).

Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berupaya menangani isu staretgis yang dihadapi dengan program prioritas baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD agar multi pihak (*stakeholder*) semuanya dapat memenuhi harapan pemerintah pusat maupun daerah untuk menjadi tanggap, siaga, dan tangguh dalam menghadapi risiko bencana.

Amanah Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 2010-2025. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan *good and clean government* yang telah ditetapkan melalui percepatan implementasi reformasi birokrasi. Dengan demikian, pemerintah melakukan penataan kembali terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, dimana birokrasi akan menjadi tulang punggung perubahan yang didukung oleh aparatur berakhlak.

Untuk mengukur keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program prioritas maka setiap triwulan dilakukan evaluasi atas kinerja perangkat daerah.

### **1.2. Landasan Hukum.**

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
5. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
6. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Urusan Tugas Jabatan Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
7. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
8. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/695/01/HK/2023 tanggal Pembentukan Tim Data Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

### **1.3. Tujuan.**

1. Memberikan gambaran umum potensi wilayah Kabupaten Tabanan.
2. Memberikan informasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mendukung misi pertama RPJMD Semesta Berencana dalam mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman).

## II. GAMBARAN UMUM BPBD

### 2.1 Kondisi Administratif

Luas wilayah Kabupaten Tabanan adalah 839,33 Km<sup>2</sup> atau sekitar 14,90% dari luas Provinsi Bali. Secara administratif terbagi menjadi 10 (sepuluh) kecamatan dan terdiri atas 133 (seratus tiga puluh tiga) desa, 344 desa adat, 816 banjar adat. Wilayah Kabupaten Tabanan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Badung, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jembrana. Letak wilayah Kabupaten Tabanan cukup strategis karena berdekatan dengan ibukota provinsi dengan jarak 25 Km. Secara geografis berada pada posisi 8°14'30"-8°30'07"LS d, 114°54'52 - 115°12'57".

### 2.2 Kondisi Geografis Wilayah

Secara geografis berada pada posisi 8°14'30"- 8°30'07"LS d, 114°54'52 - 115°12'57".

#### a. Kondisi tutupan lahan

Kabupaten Tabanan didominasi oleh tutupan / penggunaan lahan pertanian dan perkebunan. Tutupan lahan hutan banyak ditemui di bagian utara yang memiliki ketinggian lebih dari 500 mdpl, dengan topografi / kemiringan 3-15%.

#### b. Kondisi bentuk lahan

Kabupaten Tabanan memiliki bentuk asal proses vulkanis, yang berawal dari gunung vulkanik pirba di sebelah utara, tepatnya di pegunungan catur. Bentuk vulkanik ini dalam prosesnya membentuk morfometri dan morfosekuen yang beraneka ragam, mulai dari sisi utara sampai bagian selatan wilayah Kabupaten Tabanan. Tekstur tanah sebagian besar memiliki tekstur geluh-pasiran, dimana tekstur tanah ini sangat cocok ditanami tanaman pertanian maupun perkebunan.

### 2.3 Pemetaan Risiko Bencana

Risiko bencana dapat diuraikan sebagai fungsi dari bahaya (hazard) dan kerawanan (*vulnerability*), yang dapat dikombinasikan dengan kemampuan untuk mengatasi bencana ( *coping capacity*).

Ancaman bencana di Kabupaten Tabanan diidentifikasi ada 12 (dua belas) kelompok ancaman : 1). Bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, gunungapi, tanah longsor, 2). Bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, kebakaran hutan

dan lahan, 3). Bencana antropogenik berupa epidemik atau wabah penyakit dan kegagalan teknologi/ kecelakaan industri. Seluruh potensi bencana dapat menimbulkan dampak korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

a. Bahaya cuaca sekstrim

Cuaca ekstrim dalam hal ini adalah angin kencang merupakan angin dengan kecepatan 120 km/jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara agraris balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat dekat dengan khatulistiwa. Angin ini disebabkan antara lain perbedaan tekanan dalam suatu system cuaca seperti peningkatan tekanan udara maupun adanya pergerakan semu matahari secara tegak lurus dengan permukaan bumi (kulminasi).

b. Bahaya banjir

Daerah rawan banjir merupakan daerah yang sering atau berpotensi terjadi banjir berdasarkan besaran frekwensi kejadian atau berdasarkan parameter fisik yang berhubungan dengan karakteristik daerah banjir (*flood plain*) di suatu wilayah. Kabupaten Tabanan dalam pemetaan rawan banjir dengan menggunakan dua pendekatan yakni : 1). Mengidentifikasi daerah genangan banjir dengan pendekatan geomorfologi suatu wilayah sungai yang dapat diklarifikasi dengan ketersediaan data area dampak yang pernah terjadi, 2). Mengestimasi ketinggian genangan berdasarkan ketinggian elevasi (jarak vertikal) di atas permukaan sungai di dalam area potensi genangan.

c. Bahaya tsunami

Tsunami merupakan fenomena alam yang terjadi akibat aktivitas tektonik di dasar laut yang mengakibatkan pemindahan volume air laut dan berdampak pada masuknya air laut ke daratan dengan kecepatan tinggi. Ada 12 (dua belas) desa pesisir yang telah diidentifikasi rawan bahaya tsunami yang merhadapan langsung dengan lautan / samudra hindia.

d. Bahaya gerakan tanah lonsor

Tanah lonsor merupakan suatu proses perpindahan massa tanah atau bebatuan dengan arah miring dari kedudukan semula, sehingga terpisah dari masa yang mantap, karena pengaruh gravitasi dengan jenis gerakan berbentuk rotasi dan translasi.

e. Bahaya gempa bumi

Gempa bumi merupakan ancaman berupa intensitas guncangan di permukaan tanah pada saat terjadi gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang dapat menimbulkan korban. BPBD Kabupaten Tabanan telah memiliki Warning Receiver System sebagai alat

pendeteksi informasi gempa di seluruh Indonesia. Alat ini merupakan milik BMKG yang ditempatkan di BPBD Tabanan dalam informasi gempa.

f. Bahaya gelombang ekstrim dan abrasi

Gelombang ekstrim merupakan gelombang tinggi yang ditimbulkan oleh efek terjadinya siklon tropis dis ekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Selain gelombang ekstrim di daerah pesisir sangat rawan abrasi atau erosi pantai yang merupakan pengikisan pantai oleh tenaga gelombang serta arus dan bersifat merusak. Ada 12 desa pesisir yang rawan ancaman ini sehingga diperlukan pengetahuan bagi seluruh masyarakat pesisir.

#### **2.4 Dukungan Sumber Daya Aparatur**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan visi dan misi pemerintah daerah didukung oleh sumber daya aparatur :

- a. Sumber daya PNS sebanyak 15 orang yang terdiri atas 1 orang Kepala Pelaksana, 1 orang Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala Sub Bagian, 9 orang Fungsional Umum dan 0 orang Fungsional Tertentu, 12 tenaga non ASN administrasi, dan 35 orang Non ASN Tim Reaksi Cepat.
- b. ASN yang telah memiliki sertifikat teknis kebencanaan sebanyak 8 orang
- c. ASN yang telah memiliki sertifikat SAKIP RB sebanyak 2 orang.
- d. TRC yang telah memiliki sertifikat teknis tanggap bencana sebanyak 35 orang

### III. RENCANA KERJA

#### 3.1 Pengukuran Stándar Pelayanan Minimal

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkolaborasi dalam pencapaian SPM urusan wajib dasar. Adapun SKPD yang berperan dalam pencapaian SPM terjaminnya pemenuhan hak pelayanan dasar warga : Dinas Pendidikan, Dians PUPR, Kesbanglimas, Satpol PP, BPBD, Dinas Sosial P3A. Adapun target kinerjanya seperti berikut ini.

SPM	Indikator tujuan	Formula	Target
Terjaminnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Warga	Rata-rata persentase Capaian SPM 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial)	Realisasi SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dibagi target perencanaan dikalikan 100	100,0%

#### 3.2 Pengukuran Indikator Kinerja Utama

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkolaborasi dalam pencapaian indikator kinerja utama. Adapun *stakeholder* yang berperan dalam pencapaian 2 (dua) indikator ini adalah Aparatur BPBD, TRC, dan Satgas. Adapun target kinerjanya berikut ini.

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam menghadapi Bencana	Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	Realisasi tanggap kebencanaan dibagi usulan dan pengaduan yang masuk dikalikan 100	100%
Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LKjIP	Nilai rewiu LKjIP dari Inspektorat	A

#### 3.3 Pengukuran Indikator Kinerja Program

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkolaborasi dalam pencapaian indikator kinerja program. Adapun *stakeholder* yang berperan dalam pencapaian 2 (dua) indikator ini adalah Aparatur BPBD, TRC, dan Satgas. Adapun target kinerjanya berikut ini.

Progam	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	Realisasi anggaran dalam mendukung pelayanan setiap triwulan dibagi target anggaran triwulan dikalikan 100	100%
Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Realisasi penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana dibandingkan dengan usulan atau pengaduan masyarakat yang masuk dikalikan 100	100%

### 3.4 Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkolaborasi dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan. Adapun *stakeholder* yang berperan dalam pencapaian 8 (delapan) indikator ini adalah Aparatur BPBD, TRC, dan Satgas. Adapun target kinerjanya berikut ini

Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	Jumlah kecamatan yang mendapatkan edukasi dan informasi rawan bencana	10 kecamatan
Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	Realisasi wilayah kecamatan yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi target perencanaan dikalikan 100	100%
Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	Realisasi wilayah kecamatan yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi target perencanaan dikalikan 100	100%

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	Jumlah jenis dokumen perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja dihasilkan setahun	3 dok
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	Realisasi adminsitasi keuangan dibagi target perencanaan administrasi keuangan dikalikan 100	100%
Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum BPBD	Realisasi adminsitasi umum dibagi target perencanaan administrasi umum dikalikan 100	100%
Pengadaan BMD penunjang urusan PD	Prosentase terpenuhinya pengadaan BMD	Realisasi pengadaan BMD dibagi target perencanaan pengadaan BMD dikalikan 100	100%
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	Realisasi penyediaan jasa penunjang urusan kantor dibagi target perencanaan penyediaan jasa penunjang dikalikan 100	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya BMD yang menunjang urusan kantor	Realisasi pemenuhan BMD yang layak oeprasional dibagi target perencanaan pemenuhan BMD dikalikan 100	100%

Sumber : DPA, 2023

### 3.5 Pengukuran Indikator Sub Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkolaborasi dalam pencapaian indikator kinerja sub kegiatan. Adapun *stakeholder* yang berperan dalam pencapaian 8 (delapan) indikator ini adalah Aparatur BPBD, TRC, dan Pentahelik. Adapun target kinerjanya berikut ini.

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Klinerja
Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang menerima KIE rawan bencana	50 orang
Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitas dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	2 kawasan
	Penyusunan rencana	Jumlah dokumen rencana	Jumlah dokumen RPB dihasilkan	1 dokumen

	penanggulangan bencana kabupaen/ kota	penanggulangan bencana yang dilegalisasi		
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah aparaturn dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	Jumlah orang yang mengikuti gladi kesiapsiagaan bencana	100 orang
	Penanganan pasca bencana kabupaten/kota	Prosentase pemulihan terhdap pasca bencana	Jumlah masyarakat terfasilitasi rekon dibagi jumlah yang terdampak bencana dikalikan 100	100%
Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota	Persentase respon penanganan darurat bencana	Jumlah kejadian bencana dibagi jumlah yang tertangani dikalikan 100	100%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja diahsilkan	2 dokumen
	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja dihasilkan	1 laporan
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	14 orang
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD dihasilkan	2 laporan
Administrasi umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik disediakan untuk penerangan kantor	1 paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan Logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket logistik kantor disediakan mendukung rumah tangga kantor	8 paket
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah paket RT yang tersedia mendukung operasional kantor	1 paket
	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang	Jumlah paket barang cetakan/ jilid disediakan	2 paket

	Penggandaan	disediakan	mendukung pelayalan administrasi	
	Penyediaan bahan material	Jumlah paket/material yang disediakan	Jumlah alat kantor, kertas/cover, tinta disediakan mendukung operasinal kantor	3 paket
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan tugas dinas dihasilkan dalam menyelesaikan tugas	2 laporan
Pengadaan BMD penunjang urusan PD	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah peralatan kantor yang diadakan emndukung operasional kerja	3 unit
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai disediakan mendukung akurasi pelaporan	150 laporan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan bulanan penyediaan listrik, air, telepon untuk kelancaran operasional	12 laporan
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah layanan gaji dan iuran jasa tenaga administrasi diterima non ASN	12 laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perijinan kendaran dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	10 unit
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan kerja yang diservis untuk kelancaran kerja	27 unit

Sumber : DPA, 2023

## IV. EVALUASI KINERJA

### 4.1 Capaian Indikator Kinerja

#### a. Capaian Indikator SPM

Capaian kinerja ini mendukung capaian indikator kinerja 6 SPM (rata-rata persentase capaian SPM 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial). Bagian Tata Pemerintahan Setda mengkoordinasikan perangkat daerah BPBD, Kesbangpol, dan Satpol PP dalam pemenuhan kriteria kinerja TRANTIBUMLINMAS yang diinput dalam aplikasi Kementerian Dalam Negeri : [spm.bangda.kemendagri.go.id](http://spm.bangda.kemendagri.go.id) dan nilainya dikeluarkan oleh Ditjen Pembangunan Daerah. Tahun 2022 capaian kinerjanya adalah 85,65 atau masih dibawah target 100%. Hasil pengukuran kinerja Semester I 2023 seperti tabel berikut ini.

No	SPM	Indikator	Realisasi / tahun	
			2022	2023 -I
1	Terjaminnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Warga	Rata-rata persentase Capaian SPM 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial)	85,65%	60,20%

Sumber : aplikasi Kemendagri, 2023

#### b. Capaian IKU

BPBD dalam mencapai 2 (dua) kinerja utama di tahun 2022 sudah mampu 100%. Hasil analisis sebagai berikut :

- Semua usulan atau pengaduan masyarakat akan kebencanaan telah dapat dilayani/ diselesaikan secara administratif oleh manajemen BPBD dan secara teknis oleh TRC (Tim Reaksi Cepat) BPBD dengan dukungan 35 orang personal yang bertugas dua shift yang terbagi 4 (empat) kelompok sehingga 24 jam personal TRC siaga.
- Akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang dinilai oleh Inspektorat melalui dokumen LKjIP sebagai bagian dari dokumen SAKIP sudah memperoleh nilai 62,25 atau B yang dikeluarkan nilainya tahun 2021 dan dengan nilai 70,41 atau BB yang dikeluarkan nilainya di tahun 2023. Hasil pengukuran kinerja seperti tabel berikut ini

No	Sasaran	Indikator	Realisasi / tahun	
			2022	2023-I
1	Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LKjIP	B	BB

Sumber : Data diolah, 2023

### c. Capaian IKP

Pencapaian indikator kinerja dua program sudah 100% Hasil analisis sebagai berikut :

- persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD sudah terlaksana 100% dalam menunjang kelancaran aministrasi dan kelancaran pelayanan publik.
- prosentase penanganan prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana yang sudah terealisasi 100% dengan waktu tanggap bencana 24 jam 7 hari kerja. Hasil pengukruan kinerja seperti tabel berikut ini

No	Program	Indikator	Realisasi / tahun	
			2022	2022-I
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	42%
2	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	100%	100%

### e. Capaian IKK

Pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan pada prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana didukung oleh 5 (lima) capaian indikator sub kinerja kegiatan yang sudah juga terealisasi 100% karena didukung 5 (lima) output masing-masing sub kegiatan yang sinergis dengan indikator 3 (tiga) kegiatan. Hasil analisisnya :

- tahun 2021 telah tersusun dokumen kajian risiko bencana (KRB) sebagai pedoman kebencanaan.
- tahun 2023 telah dirancang administrasi konsultan penyusun RPB
- telah dilakukan edukasi dan sosialisasi sebanyak 58 orang (17 orang perangkat daerah) dan hybrid kepada 41 aparatur desa.
- ada dua desa yaitu desa Tegal Mengkeb dan desa Berembeng yang difokuskan akan mendapat edukasi kesiapsiagaan bencana.
- sudah dilakukan 112 survey dan pengusulan tanggap darurat sesuai prosedur yang sumber dananya ada di Badan Keuangan Daerah.

- sudah dilakukan 122 penanggulangan bencana di setiap usulan dan pengaduan masyarakat yang ditangani Tim Reaksi Cepat.
- telah dilakukan penyempurnaan administrasi keuangan, manajemen perkantoran dalam tata kelola pemerintahan yang baik mulai dari peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi secara berkala sehingga dapat menekan penyimpangan yang terjadi.
- telah melakukan penyempurnaan pelayanan sesuai SOP dan standar pelayanan. Hasil pengukuran kinerja seperti tabel berikut ini

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi / tahun	
			2022	2023-I
1	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 kec	4 kec
2	Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	58,3%
3	Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban	Persentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	100%	100%
4	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 dokumen	2 dokumen
5	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%	15,7%
6	Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum BPBD	100%	50%
7	Pengadaan BMD penunjang urusan PD	Persentase pengadaan barang BMD yang layak operasional	100%	50%
8	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	100%	45%
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya BMD yang menunjang urusan kantor	100%	40%

Sumber : Data PPTK, 2023

#### **4.2 Capaian Kinerja Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus berupaya melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sebagai suatu investasi bagi semua stakeholder dengan fokus pada masyarakat desa sesuai tujuan pemerintahan yaitu terwujudnya Tabanan tangguh dari desa. Adapun hasil kerja yang dilakukan periode Semester I tahun 2023 sebagai berikut :

- disebarluaskannya informasi lainnya melalui facebook, website, dan media lainnya di daerah rawan bencana (pesisir pantai dan pegunungan / daerah teridentifikasi rawan bencana).
- sosialisasi kebencanaan yang diberikan kepada 17 orang aparatur perangkat daerah dan 133 aparatur desa di 10 kecamatan.
- persiapan penguatan kelembagaan yang tahun 2023 difokuskan di Desa Tegal Mengkeb dan Desa Berembeng, dua desa ini didorong menguatkan kelembagaan desa siaga bencana menuju desa tangguh bencana.
- Sosialisasi kesiapsiagaan dan simulasi bencana gempa bagi siswa SMP 2 Tabanan sebanyak 250 orang dan simulasi kebencanaan SMP 5 Tabanan sebanyak 200 orang, siswa Pramuka binaan Polres Tabanan
- Gladi kesiapsiagaan dan gelar peralatan dan pasukan bagi Satgas Bencana di Lapangan Sudimara
- Sosialisasi mitigasi bencana kepada peserta pelatihan Koramil Model yang pesertanya perwakilan Babinkabtibnas seluruh Bali
- Sosialisasi mitigasi bencana di Desa Gubug, Pajahan, Bajera, Mengesta
- Sosialisasi mitigasi bencana dan simulasi kebencanaan di UPTD Puskesmas Selemadeg dan Rumah Sakit Bahkti Rahayu

Pengumpulan data pencegahan bencana yang diusulkan masyarakat / program pemerintah melalui edukasi dan sosialisasi direkap dan dilaporkan setiap bulan atau sewaktu-waktu diperlukan pimpinan daerah. Adapun kegiatan edukasi dilaksanakan di 10 kecamatan.

#### **4.3 Capaian Tanggap Bencana dan Penyaluran Logistik**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Pasal 1 dan Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa waktu tanggap adalah waktu yang dibutuhkan dalam serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat info masuk kejadian bencana untuk menangani dampak

buruk yang ditimbulkan. Untuk memenuhi serangkaian kegiatan tersebut disepakati durasi waktu Tanggap maksimal 24 jam agar kejadian segera dapat penanganan awal.

Koordinasi data dengan instansi terkait (instansi pemerintah, TNI, Polri, PMI, Satgas, Forum, Swasta, Tagana, Basarnas, desa, dan lainnya). Pengumpulan data kebencanaan dan pelayanannya berbasis aplikasi yang diinput sebagai hasil Tim Reaksi Cepat dalam menangani permohonan masyarakat yang terdampak bencana atau berisiko terdampak bencana. Data tersebut selain dapat diketahui setiap hari juga direkap dan dilaporkan setiap bulan atau sewaktu-waktu diperlukan pimpinan daerah (Bupati, Gubernur, BNPB). Adapun rekap data tanggap bencana seperti berikut ini.

Tabel Kejadian bencana dan reaksi cepat penanganan bencana BPBD

No	Kejadian bencana	Tahun 2022 Per kejadian	Tahun 2023 Semester I	Analisis
1	Pohon tumbang	155	53	Semua dapat ditangani dengan cepat sesuai SOP
2	Tanah longsor	219	32	Semua dapat ditangani dengan cepat sesuai SOP
3	Kebakaran	39	12	Semua dapat ditangani dengan cepat sesuai SOP
4	Gempa bumi	0	2	Semua dapat ditangani dengan cepat sesuai SOP
5	Banjir	62	0	Semua dapat ditangani dengan cepat sesuai SOP
6	Lain-lain	71	26	Semua dapat ditangani dengan cepat sesuai SOP
	Jumlah kejadian	499	123	

Sumber : Laporan TRC, 2023

#### 4.4 Capaian Rekonstruksi dan Rehabilitasi

BPBD telah membentuk Tim sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 180/23/HK/01/2023 tentang Pembentukan Tim Kajian dan Kebutuhan Serta Monitoring Pasca Bencana sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 180/34/HK/01/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 180/23/HK/01/2023 tentang Pembentukan Tim Kajian dan Kebutuhan Serta Monitoring Pasca Bencana untuk menerima dan memverifikasi permohonan dana pascabencana dari masyarakat.

Verifikasi administrasi dan lapangan dilakukan oleh Tim untuk dibuatkan kajian kebutuhan pascabencana dan kajian tersebut dilaporkan kepada kepala pelaksana BPBD yang memuat uraian kejadian bencana/musibah, nama pemohon, nilai kerusakan dan usulan bantuan. Kajian Kebutuhan Pascabencana diajukan oleh Kepala Pelaksana kepada

Bupati melalui Sekda/Asisten I untuk mendapatkan persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), persetujuan dimaksud dalam bentuk Surat Keputusan Bupati. Usulan Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan akibat Bencana/Musibah dalam Penanganan Perbaikan Rumah maupun Perbaikan Fasilitas Umum Tahun Anggaran 2023 sesuai Surat Kepala Pelaksana BPBD Nomor 360/314/BPBD, tanggal 31 Maret 2023.

Adapun bantuan yang diusulkan sebanyak 112 Unit dengan nilai sebesar Rp. 2.226.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah), yaitu untuk perbaikan rumah masyarakat sebanyak 43 unit dengan nilai sebesar Rp. 628.000.000,00 (Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah), untuk perbaikan fasilitas umum sebanyak 69 unit dengan nilai sebesar Rp. 1.598.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah)

#### 4.5 Pengelolaan Aset

Aset BPBD Kabupaten Tabanan sudah dilakukan pengelolaan secara tertib sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Manajemen pengelolaan keuangan dan barang milik negara di BPBD Kabuapten Tabanan secara terus menerus melakukan penyempurnaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Adapun data barang milik daerah sesuai KIB disajikan seperti tabel berikut ini:

Tabel Data BMD sesuai KIB

No	KIB	Uraian	Nilai/Rp
1	A	Tanah	190.600.000
2	B	Peralatan dan mesin	2.972.592.651
3	C	Gedung dan bangunan	257.565.000
4	D	Jalan, jaringan, dan irigasi	0
5	E	Aset tetap lainnya	9.00.000
6	F	Kontruksi dalam pengerjaan	0

Sumber : Laporan Aset, 2023

#### 4.6 Pengelolaan Keuangan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2023 maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor .... Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Tabanan Tahun Anggaran 2023 maka BPBD mengelola anggaran Rp.3.673.458.376,00 yang terbagi menjadi belanja operasi sebesar Rp.1.824.756.656,00, atau 99,32% dan belanja modal sebesar Rp.24.939.800 (0,68%). Data keuangan disajikan seperti berikut ini.

Tabel Realisasi keuangan

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.823.756.656	1.135.349.067	62,25
2	Belanja Barang dan Jasa	1.823.761.920	672.591.554	47,51
3	Belanja Hibah	0	0	0
4	Belanja Modal	24.939.800	11.850.000	36,88
Jumlah		3.673.458.376	1.819.790.621	49,55

Sumber : LRA, 2023

#### 4.7 Peningkatan SDM Aparatur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam meningkatkan kompetensi SDM aparaturnya dalam memenuhi aturan kepegawaian 20 JP bagi aparatur telah didorong :

- a. Bimtek e- learning bagi 2 orang aparatur yang diselenggarakan oleh BNPB
- b. Bimtek penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana bagi 2 orang aparatur yang diselenggarakan oleh BNPB di Bali

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mengumpulkan dan menyusun rencana evaluasi pengukuran kinerja baik SPM, indikator kinerja daerah, indikator kinerja utama, indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, dan indikator kinerja keuangan.
- b. Capaian kinerja telah dievaluasi secara berkala di triwulan satu.
- c. Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diukur pada Semester I melalui SPM sudah mencapai 60,20%, capaian indikator kinerja utama (IKU) sudah mencapai sebesar 93,75% yang didukung oleh capaian indikator kinerja program (IKP) dalam Renja dengan rata-rata capaian *outcome* sebesar 60,60%, serta didukung dari capaian kinerja kegiatan (IKK) dengan rata-rata capaian output sebesar 57,05%.
- d. Capaian kinerja keuangan secara umum adalah 49,55% yang terdiri dari capaian kinerja belanja pegawai 62,65%, barang dan jasa sebesar 47,51%, capaian kinerja belanja modal sebesar 36,88% atau masih di bawah target kinerja keuangan yang ditetapkan dalam DPA

### 5.2 Saran

Dari uraian hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran strategis yang akan dilaksanakan tahun berikutnya dan dukungan pendanaan pada masing-masing sasaran strategis sehingga kinerja dapat lebih dioptimalkan.
- b. Untuk mengatasi permasalahan yang masih sulit dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai *stakeholder* sehingga penurunan risiko bencana dapat terintegrasi.

Kepala Pelaksana BPBD  
Kabupaten Tabanan,  
  
I Nyoman Srinadha Giri, SE  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19740624 200604 1 010